

oleh ahli warisnya. Diharapkan kepada masyarakat melakukan jual beli tanah secara di bawah tangan untuk tidak menunda-nunda mengurus akta jual beli kepada pejabat yang berwenang dan segera mengurus sertipikat dan melakukan proses balik nama, karena masalah yang ditimbulkan dikemudian hari tidak hanya akan merepotkan para pihak saja melainkan juga Kantor Pertanahan setempat selaku Badan yang berwenang mengurus pertanahan.



A. Buku-buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

-----, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Bina Cipta, Jakarta, 2006.

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, 2002.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

F.X. Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Universitas Lampung, BandarLampung, 2015.

-----, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, Indepth Publising, BandarLampung, 2012.

Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011,

J.B Daliyo dan kawan-kawan, *Hukum Agraria I*, Jakarta: Prehallindo, (2010),

M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mhd.Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2010.

Mochtar Kusumaadmadja dan Arief B.M Sisharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Murtir Jeddawi. 2011. *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, TotalMedia.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

Salim HS dan Erlish Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jaga Ketertiban*, UKI Pers, Jakarta, 2006

-----, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011.

Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

B. Jurnal/Tesis/Web-site

Anna Priscilla Meilita, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pemegang Sertipikat Hak Milik Terhadap Penerbitan Sertipikat Yang Cacat Administrasi*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015

Carina Etta Siahaan, *Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Yang Dianggap Cacat Administrasi (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/TUN/1998"*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, 2017

Andina Alfia Rizqi, *Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)*, Notarius, Volume 11 Nomor 2, 2018

Jacklyn Samantha Kotalino, *Analisis Kasus Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 33/G/2014/Ptun.Mdo)*, *Lex Administratum*, Vol.Xi/No.3, 2023

Firman, *Penyelesaian Hukum Terhadap Penertiban Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Cacat Hukum Administrasi Pada Kantor Pertanahan Kota Baubau*, *Dimamika Hukum*, Volume 12, No.1, 2021

Kiki Rizki, *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, *Aktualita*, Vol. 3 No. 1, 2020

Ni Made Silvia Gayatri, *Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi*, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Tito Inneka Widyawati, *“Pengendalian Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang”*, Jurnal STISIP YUPPEN TEK Tangerang, Vol. 13 No. 2 tahun (2016),

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

